



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : KU.001/1/6/DJPD/2023
Klasifikasi : **SANGAT SEGERA**
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Penyusunan Pagu Kebutuhan TA.2024
di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat

Jakarta, 13 Januari 2023

Yth. Mohon Periksa Daftar Terlampir

Menyusuli surat kami terdahulu nomor : KU.001/10/1/DJPD/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal Persiapan Penyusunan Pagu Kebutuhan RKA K/L TA.2024 dan menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan nomor : PR.101/1/2 PHB 2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal Penginputan Aplikasi *E-Planning* untuk Tahapan Pagu Kebutuhan Kementerian Perhubungan TA.2024, bersama ini disampaikan terkait Penyusunan Pagu Kebutuhan TA.2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut :

1. Rencana pembahasan Pagu Kebutuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat TA.2024 akan dilaksanakan mulai Minggu ke-3 Januari 2023;
2. Pembahasan akan dilakukan menggunakan aplikasi *E-Planning* sehingga masing-masing Satuan Kerja untuk dapat menyelesaikan penginputan Pagu Kebutuhan pada Aplikasi *E-Planning* sebelum jadwal pembahasan;
3. Penginputan usulan pada Aplikasi *E-Planning* untuk dapat disertai kelengkapan data dukung sebagaimana *readiness criteria* pengusulan kegiatan yang ditentukan.
4. Guna tertib administrasi, secara paralel diminta kepada :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Teknis untuk menyampaikan usulan Pagu Kebutuhan TA.2024 melalui surat resmi sesuai ketentuan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP);
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Balai dan KSOPP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menyampaikan usulan melalui surat resmi dengan melampirkan usulan Pagu Kebutuhan TA.2024 sebagaimana format terlampir.
5. Usulan yang disampaikan diharapkan telah mempertimbangkan kesesuaian dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang disusun dan diassessment berdasarkan skala prioritas dengan disertai rasionalisasi nilai kebutuhan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk dapat menyampaikan Usulan Pagu Kebutuhan TA.2024 dimaksud kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat c.q Bagian Perencanaan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Januari 2023 guna proses lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat,



Ditandatangani secara elektronik
AMIRULLOH

Tembusan :
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

NIP. 19740730 199703 1 001

Lampiran I Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat

Nomor : KU.001/1/6/DJPD/2023

Tanggal : 13 Januari 2023

1. KPA Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. KPA Satker Direktorat Lalu Lintas Jalan;
3. KPA Satker Direktorat Angkutan Jalan;
4. KPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
5. KPA Satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan;
6. KPA Satker Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
7. KPA Satker BPLJSKB Bekasi;
8. KPA Satker BPTD Wilayah I Propinsi Aceh;
9. KPA Satker BPTD Wilayah II Propinsi Sumatera Utara;
10. KPA Satker BPTD Wilayah III Propinsi Sumatera Barat;
11. KPA Satker BPTD Wilayah IV Propinsi Riau dan Kepri;
12. KPA Satker BPTD Wilayah V Propinsi Jambi;
13. KPA Satker BPTD Wilayah VI Propinsi Bengkulu dan Lampung;
14. KPA Satker BPTD Wilayah VII Propinsi Sumsel dan Babel;
15. KPA Satker BPTD Wilayah VIII Propinsi Banten;
16. KPA Satker BPTD Wilayah IX Propinsi Jawa Barat;
17. KPA Satker BPTD Wilayah X Propinsi Jawa Tengah dan DIY;
18. KPA Satker BPTD Wilayah XI Propinsi Jawa Timur;
19. KPA Satker BPTD Wilayah XII Propinsi Bali dan NTB;
20. KPA Satker BPTD Wilayah XIII Propinsi NTT;
21. KPA Satker BPTD Wilayah XIV Propinsi Kalimantan Barat;
22. KPA Satker BPTD Wilayah XV Propinsi Kalimantan Selatan;
23. KPA Satker BPTD Wilayah XVI Propinsi Kalimantan Tengah;
24. KPA Satker BPTD Wilayah XVII Propinsi Kaltim dan Kaltara;
25. KPA Satker BPTD Wilayah XVIII Propinsi Sulawesi Tenggara;
26. KPA Satker BPTD Wilayah XIX Propinsi Sulsel dan Sulbar;
27. KPA Satker BPTD Wilayah XX Propinsi Sulawesi Tengah;
28. KPA Satker BPTD Wilayah XXI Propinsi Gorontalo;
29. KPA Satker BPTD Wilayah XXII Propinsi Sulawesi Utara;
30. KPA Satker BPTD Wilayah XXIII Propinsi Maluku;
31. KPA Satker BPTD Wilayah XXIV Propinsi Maluku Utara;
32. KPA Satker BPTD Wilayah XXV Propinsi Papua dan Papua Barat;
33. KPA Satker KSOPP Danau Toba.

[illegible]

[illegible]

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH RAYA (Rp. 1000)	DATA DUKUNG		UMUM					REHAB		LANJUTAN				BARU			KET		KET
						TOR	RAB	SPTJM	KESANGGUPAN ASET	SEUSIA RENA	SESUAT RKP	JALAN AKSES	FOTO	REK.PU	DED/SPEK TEKNIS	TAHAPAN	FORMULA PERINTIS	DATA KINERJA	FS	SID	MASTERPLAN/ LAYOUT	ANDALAN	LAHAN	
052	Berthuan, Jarak Perencanaan Jalan																							
053	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)																							
109	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)																							
051	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)																							
111	Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)																							
051	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)																							
113	Implementasi Batas Kecepatan																							
051	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan																							
114	Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor																							
051	Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor																							
052	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor																							
115	Kapal Patroli/Multiurpose																							
051	Pembangunan Kapal Patroli/Multiurpose																							
117	Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Rambu Suar																							
051	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Rambu Suar																							
118	Rambu Sungai dan Danau																							
051	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai dan Danau																							
CDP/RSP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat																							
124	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)																							
051	Pembangunan/Peningkatan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Baru																							
052	Pembangunan/Peningkatan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Lanjutan																							
126	Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor																							
051	Pembangunan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor																							
127	Taman Edukasi																							
051	Pembangunan Taman Edukasi																							
128	Pengerukan Kolam Pelabuhan																							
051	Pengerukan Kolam Pelabuhan																							
CCC	QM Sarana Bidang Konektivitas Darat																							
149	Pemeliharaan Perencanaan Jalan																							
051	Pemeliharaan Perencanaan Jalan																							
151	Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor																							
051	Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor																							
152	Pemeliharaan Kapal																							
051	Pemeliharaan Kapal																							
154	Operasional Tuq Boat dan Kapal Patroli																							
051	Operasional Tuq Boat dan Kapal Patroli																							
CDP	QM Prasarana Bidang Konektivitas Darat																							
155	Rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)																							
051	Rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)																							
157	Pengelolaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)																							
051	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)																							
158	Pengelolaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dengan Pihak Kedua																							
051	Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua																							

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH RAYA (Rp. 1000)	DATA DUKUNG		UMUM					REHAB		LANJUTAN				BARU				KET		KET	
						TOR	RAB	SPTJM	KESANGGU PAN ASET	SEUSIA RENJA	SESUAI RKP	JALAN AKSES	FOTO	REK.PU	DED/SPEK TEKNIS	TAHAPAN	FORMULA PERINTIS	DATA KINERJA	FS	SID	MASTERPLA N/ LAYOUT	ANDALALIN	LAHAN	LENGKAP		TIDAK
D	PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT																									
ABF/PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana																									
101	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana																									
051	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana																									
1																										
ADC	Sertifikasi Produk																									
105	Blanko SUT dan SRUT																									
051	Pengadaan Blanko SUT dan SRUT																									
1																										
106	Bukti Lulus Uji Berkala																									
051	Pengadaan Bukti Lulus Uji Berkala																									
1																										
CAC/RAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat																									
107	Pendukung Tupoksi Dittien Perhubungan Darat																									
051	Pendukung Tupoksi Dittien Perhubungan Darat																									
1																										
CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat																									
112	Pembayaran Tunjangan																									
051	Pembayaran Tunjangan Dittien Perhubungan Darat																									
1																										
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan																									
923	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan																									
051	Tupoksi Dittien Perhubungan Darat																									
1	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan																									
	Belanja.....																									
	Belanja.....																									
	Belanja.....																									
2	Monitoring Pengelolaan Sarana Dan Angkutan																									
	Belanja.....																									
	Belanja.....																									
	Belanja.....																									
3	Monitoring Pengendalian Sarana Dan Angkutan																									
	Belanja.....																									
	Belanja.....																									
	Belanja.....																									
4	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana																									
	Belanja.....																									
	Belanja.....																									
	Belanja.....																									
5	Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas																									
	Belanja.....																									
	Belanja.....																									
	Belanja.....																									
6	Monitoring Pengendalian Lalu Lintas																									
	Belanja.....																									
	Belanja.....																									
	Belanja.....																									
7	Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas Dan Angkutan																									
	Belanja.....																									
	Belanja.....																									
	Belanja.....																									
E	DUKUNGAN MANAJEMEN																									
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat																									
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal																									
994	Layanan Perkantoran																									
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor																									
1																										
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal																									
951	Layanan Sarana Internal																									
051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi																									
1																										
052	Pengadaan Belanja Modal Lainnya																									
1																										
971	Layanan Prasarana Internal																									
051	Pembangunan Gedung Kantor																									
1																										
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat																									
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal																									
994	Layanan Perkantoran																									

PENJELASAN TERKAIT STANDARISASI FORMAT TUPOKSI
NOMENKLATUR PENGELOMPOKAN BELANJA BERDASARKAN
RENCANA PERATURAN MENTERI (RPM)
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT

[illegible]

**NOMENKLATUR PENGELOMPOKAN BELANJA TUPOKSI BERDASARKAN RENCANA PERATURAN MENTERI (RPM)
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**

No	Program/Kegiatan	Fungsi
1	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana, Program, Dan Anggaran; 2. Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, Dan Hubungan Masyarakat
2	Monitoring Pengelolaan Sarana Dan Angkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalibrasi Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor 3. Pemeriksaan Dan Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan; 4. Bantuan Teknis Penyediaan Sarana Sungai, Danau, Dan Penyeberangan. 5. Melaksanakan Kegiatan Pemberian Subsidi Angkutan Jalan, Dan Kegiatan Pelayaran Perintis Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan.
3	Monitoring Pengendalian Sarana Dan Angkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Rekomendasi Penetapan Trayek Dan/Atau Jadwal Operasi Angkutan Jalan 2. Pemberian Rekomendasi Penetapan Trayek Angkutan Jalan Yang Disubsidi Oleh Pemerintah Pusat; 3. Penetapan Jadwal Operasi Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
4	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Terminal Tipe A, Terminal Barang Untuk Umum, Dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Pelabuhan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan; 3. Pelaksanaan Pelayanan Jasa Terminal Tipe A, Terminal Barang Untuk Umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Pelaksanaan Pelayanan Jasa Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan; 5. Pelaksanaan Pengoperasian Dan Perawatan Terminal Tipe A, Terminal Barang Untuk Umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Pelaksanaan Pengoperasian Dan Perawatan Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan. 7. Bantuan Teknis Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda. 8. Bantuan Teknis Pelabuhan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan.

5	Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penyediaan, Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan; 2. Pelaksanaan Penyediaan, Pengoperasian, Dan Perawatan Teknologi Rekayasa Lalu Lintas Jalan; 3. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan; 4. Pelaksanaan Penyediaan, Pengoperasian, Dan Perawatan Rambu Sungai Dan Danau, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Serta Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau, Dan Penyeberangan; 5. Pelaksanaan Pengerukan Dan Reklamasi Di Kolam Pelabuhan Penyeberangan Serta Alur Sungai Dan Danau; 6. Bantuan Teknis Halte Serta Rambu Sungai Dan Danau. 7. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
6	Monitoring Pengendalian Lalu Lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Laik Fungsi Jalan Nasional Non Tol; 2. Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Persetujuan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Oleh Pemerintah Daerah. 3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan
7	Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas Dan Angkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengamatan Dan Pemantauan Pemenuhan Perlengkapan Jalan; 2. Pelaksanaan Pengamatan Dan Pemantauan Perusahaan Angkutan Jalan, Perusahaan Karoseri, Penyelenggara Pengujian Kendaraan, Penyelenggaraan Jembatan Timbang, Penyelenggara Terminal; 3. Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Bantuan Teknis